

## RINGKASAN

**YONATAN DEA LORENZA**, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022), Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H., dan Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Profesi Notaris merupakan bagian dari bidang hukum yang dihormati (*nobile officium*) karena akta yang disusun oleh Notaris memiliki potensi menjadi dasar hukum tentang kepemilikan aset, hak, dan tanggung jawab individu. Notaris, sebagai pejabat umum, harus menjalankan tugasnya dengan integritas moral, kejujuran, dan kesadaran akan batas kewenangannya dalam membuat akta autentik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta kuasa menjual tanpa persetujuan penghadap serta implikasi langsung terhadap akta yang dinyatakan palsu. Metode penelitian dalam Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dan disajikan dalam bentuk disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual, sebagaimana terungkap dalam Putusan No. 1209 K/Pid.B/2022. Analisis pertanggungjawaban dilakukan dari aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam aspek pertanggungjawaban hukum pidana, Notaris Madiyahana Herawati telah dikenai hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam aspek hukum perdata, pemalsuan Akta Kuasa Menjual oleh Notaris melanggar Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Selanjutnya, dalam pertanggungjawaban hukum administrasi, Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terlibat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara dari jabatan Notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d atau e UUJN. Selain itu, implikasi langsung terhadap Akta Kuasa Menjual yang dinyatakan palsu dalam Putusan No. 1209 K/Pid.B/2022 tersebut dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan Pasal 1335 KUHPperdata.

**Kata kunci:** Notaris, Pemalsuan Akta, Akta Kuasa Menjual

## SUMMARY

**YONATAN DEA LORENZA**, *Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Responsibility of Notaries for Forgery of Power of Attorney Deeds (Study of Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022), Supervisory Commission: Chair Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H., and Member Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.*

*The Notary profession is part of a respected field of law (nobile officium) because deeds drawn up by Notaries have the potential to become the legal basis for individual asset ownership, rights and responsibilities. Notaries, as public officials, must carry out their duties with moral integrity, honesty and awareness of the limits of their authority in making authentic deeds.*

*This research aims to determine and analyze the responsibility of Notaries for falsifying power of attorney deeds to sell without the consent of the person present as well as the direct implications of deeds that are declared fake. The research method in this thesis uses a normative juridical research type with prescriptive research specifications. The data sources used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use library research techniques and are presented in the form of narrative text.*

*This research examines the responsibility of a Notary for falsifying a Power of Attorney to Sell Deed, as revealed in Decision No. 1209 K/Pid.B/2022. Liability analysis is carried out from the aspects of criminal law, civil law and administrative law. In terms of criminal law accountability, Notary Madiyahana Herawati has been sentenced to prison for 1 year and 6 months, in accordance with Article 264 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. In the aspect of civil law, falsifying the Deed of Power of Attorney to Sell by a Notary violates Article 1320 of the Civil Code, so that compensation can be requested based on Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, in administrative law responsibilities, Notaries are required to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of the parties involved, in accordance with Article 16 paragraph (1) letter a UUJN. This violation can result in administrative sanctions, such as temporary dismissal from the position of Notary based on Article 9 paragraph (1) letter d or e UUJN. Apart from that, the direct implications for the Deed of Power of Attorney to Sell which was declared fake in Decision no. 1209 K/Pid.B/2022 was declared null and void in accordance with Article 1335 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Notaries, Forgery of Deeds, Deeds of Power of Sale*